



Analisis Indeks Centralitas Skalogram Terbobot Untuk Penentuan Sistem Hierarki Wilayah Di Pulau Sulawesi

M. Raihan Noer¹, Salsabila Fayza², Cindy Eleonora Sitohang³, Novita Hotma Uli Sitanggang⁴, Hilkia Natasya Br. Ginting⁵, Lucky Satria Pratama⁶

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan¹²³⁴⁵⁶

Received: 07 July 2025
Revised: 16 July 2025
Accepted: 23 July 2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis sistem hierarki wilayah di Pulau Sulawesi yang terletak di antara 2°08' Lintang Utara dan 170° 17' Bujur Timur dan dilewati garis khatulistiwa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode indeks centralitas skalogram berbobot. Pendekatan ini mengevaluasi tingkat kelengkapan fasilitas di setiap provinsi untuk menentukan hierarki wilayah berdasarkan peran strategisnya dalam pembangunan regional. Data dikumpulkan dari sumber sekunder resmi, seperti Badan Pusat Statistik dan kementerian terkait, untuk menilai distribusi fasilitas di enam provinsi di Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam distribusi fasilitas, dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara menduduki hierarki tertinggi, sedangkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berada pada hierarki terendah. Koefisien reproduktibilitas (COR) sebesar 0,84 mencerminkan efisiensi distribusi yang masih perlu ditingkatkan. Temuan ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan yang berkeadilan, terutama di wilayah dengan fasilitas minim. Studi ini diharapkan dapat mendorong perencanaan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih merata di Pulau Sulawesi.

Kata Kunci: Distribusi Fasilitas Daerah, Ketimpangan Daerah, Pembangunan Daerah

(*) Corresponding Author:

raihannoer9@gmail.com¹, salsabilafayza21@gmail.com²,
cindyeleonora01@gmail.com³, novitasitanggang28@gmail.com⁴,
hilkianatasyabrginting@gmail.com⁵, luckysatriapratama27@gmail.com⁶

How to Cite: Noer, M., Fayza, S., Sitohang, C., Sitanggang, N., Br. Ginting, H., & Pratama, L. (2025). Analisis Indeks Centralitas Skalogram Terbobot Untuk Penentuan Sistem Hierarki Wilayah Di Pulau Sulawesi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.A), 160-177. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11041>

PENDAHULUAN

Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sumber daya alam, serta karakteristik geografis yang unik. Pulau ini terbagi menjadi beberapa wilayah administratif yang masing-masing memiliki potensi dan tantangan pembangunan yang berbeda. Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, memahami hierarki wilayah menjadi aspek penting untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien, optimalisasi potensi lokal, serta pemerataan pembangunan.

Hierarki wilayah merupakan konsep yang menggambarkan tingkatan atau struktur hubungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya dalam sistem tertentu. Penentuan hierarki wilayah biasanya didasarkan pada indikator-indikator sosial, ekonomi, infrastruktur, dan demografi. Untuk menganalisis hierarki wilayah secara lebih objektif dan akurat, diperlukan pendekatan yang memadukan teknik statistik dengan pemetaan spasial. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis indeks centralitas skalogram berbobot.

Metode ini memungkinkan pengukuran tingkat centralitas suatu wilayah berdasarkan keberadaan dan fungsi fasilitas yang tersedia, dengan mempertimbangkan bobot atau pengaruh fasilitas tersebut terhadap aktivitas masyarakat. Penggunaan indeks centralitas

berbobot pada analisis skalogram memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kedudukan relatif suatu wilayah dalam sistem hierarki yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks centralitas skalogram berbobot guna menentukan sistem hierarki wilayah di Pulau Sulawesi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan regional serta wilayah yang memerlukan prioritas perhatian dalam pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik. Analisis ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Pulau Sulawesi.

Teori Analisis Skalogram

Analisis skalogram merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan akses pelayanan melalui fasilitas umum, termasuk fasilitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Wilayah dengan tingkat kelengkapan fasilitas tertinggi dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan (Ermawati, 2010). Skalogram memberikan gambaran hierarki wilayah berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas yang tersedia, mulai dari yang paling lengkap hingga yang paling minim, sehingga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah sebagai pusat pertumbuhan (Rondinelli, 2019).

Tahapan Analisis Skalogram:

1. Mengidentifikasi semua jenis pelayanan publik yang tersedia di setiap kabupaten/kota.
2. Mengurutkan kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk, yang ditampilkan pada tabel di sisi kiri.
3. Mengurutkan jenis fasilitas berdasarkan frekuensi kemunculannya.
4. Menyusun matriks yang memetakan keberadaan fasilitas di setiap wilayah.
5. Memberi tanda angka (1) pada sel yang memiliki fasilitas dan angka 0 pada sel yang tidak memiliki fasilitas.
6. Mengatur ulang baris dan kolom dalam matriks berdasarkan frekuensi keberadaan fasilitas, di mana wilayah dengan fasilitas terbanyak ditempatkan di bagian atas daftar.
7. Mengidentifikasi peringkat atau hierarki wilayah permukiman berdasarkan persentase keberadaan fasilitas.

Keakuratan analisis ini dapat diuji menggunakan rumus *Coefficient of Reproducibility (COR)* untuk mengukur kelayakan hasil skalogram.

$$COR = 1 - \frac{\sum e}{N \times K}$$

Keterangan:

- e : Jumlah kesalahan
N : Jumlah subjek/kota
K : Jumlah objek/fasilitas

Koefisien dianggap memenuhi syarat kelayakan jika memiliki nilai antara 0,9 - 1. Pola skala Guttman yang sempurna jarang ditemukan karena sering kali terdapat penyimpangan yang disebut sebagai *error*. *Koefisien reproduibilitas (COR)* merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana skor objek penelitian dapat memprediksi respons penelitian terhadap skala yang digunakan. Menurut Soejanto (2004:40), nilai koefisien berkisar antara 0

hingga 1. Semakin mendekati angka 1, koefisien tersebut dianggap semakin sempurna. Jika nilai koefisien lebih besar ($>$) dari 0,9, skala tersebut dinilai valid dan layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian berikutnya.

Setelah jumlah orde ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung rentang untuk setiap orde menggunakan rumus berikut:

$$\text{Range} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Orde}}$$

Teori Hierarki

Istilah *hierarki* (*hierarchy*) pada dasarnya merujuk pada organisasi yang tersusun secara bertingkat (Salim, 1996). Menurut Nasoetion (1985) dalam Sukasmianto (1999), terdapat dua jenis hierarki, yaitu hierarki fungsional dan hierarki tata ruang. Hierarki fungsional terbentuk dari pengelompokan kegiatan sosial dan ekonomi tertentu yang terpusat pada lokasi tertentu yang berfungsi sebagai pusat pelayanan. Sementara itu, hierarki tata ruang mengacu pada sistem pengaturan ruang dalam suatu wilayah.

Teori Kebijakan Wilayah

Secara umum, kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam mengelola perekonomian, terutama dalam sistem pasar bebas, dengan tujuan memengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Kebijakan ini dapat didefinisikan sebagai strategi ekonomi yang bertujuan memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal melibatkan pengaturan anggaran negara, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mendukung pencapaian stabilitas ekonomi dan tujuan pembangunan. Penyesuaian pendapatan dan belanja negara mencakup pengelolaan pajak, penerbitan pinjaman dari masyarakat, serta pengeluaran pemerintah.

Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah menciptakan keseimbangan dalam distribusi pendapatan, mendukung stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kebijakan pemerintah daerah adalah langkah-langkah strategis yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota, atau desa. Kebijakan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Isi kebijakan pemerintah daerah dapat berbeda-beda tergantung pada permasalahan atau isu yang dihadapi di wilayah tersebut. Namun, secara umum, kebijakan ini mencakup beberapa bidang utama berikut:

- a. Pembangunan Infrastruktur, meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat.
- b. Pendidikan, berfokus pada peningkatan mutu pendidikan melalui pembangunan sekolah, peningkatan kualitas guru, dan pemberian bantuan pendidikan bagi siswa.
- c. Kesehatan, menitikberatkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pembangunan puskesmas atau rumah sakit, serta program pencegahan dan penanganan penyakit.

- d. Lingkungan Hidup, berisi kebijakan pelestarian lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan sumber daya air dan lahan, serta penanganan bencana alam.
- e. Pemberdayaan Masyarakat, melibatkan program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
- f. Pemerataan Pembangunan, ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal, termasuk program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi di daerah terpencil.
- g. Keamanan dan Ketertiban, meliputi upaya menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat, seperti peningkatan keamanan publik dan penanganan tindak kriminal.
- h. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, mengatur pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta meningkatkan kualitas perencanaan di wilayah tersebut.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Teori Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah, menurut International Labour Organization (ILO), merujuk pada perbedaan dalam kinerja ekonomi dan tingkat kesejahteraan antar wilayah. Pendapat serupa dikemukakan oleh Karin Vorauer (2007), yang mendefinisikan ketimpangan wilayah sebagai ketidakseimbangan struktur spasial baik di dalam suatu wilayah maupun antar wilayah.

Menurut Sirojuzilam (2005), ketimpangan tidak hanya terlihat pada distribusi pendapatan masyarakat, tetapi juga pada disparitas pembangunan antar daerah dalam suatu negara. Sementara itu, Kutscherauer et al. (2010) mendefinisikan ketimpangan wilayah sebagai perbedaan atau ketidaksamaan karakteristik, fenomena, atau kondisi lokasi yang terjadi setidaknya antara dua entitas dalam struktur wilayah. Gajdos (2006) menambahkan bahwa ketimpangan wilayah harus dinilai melalui berbagai aspek, seperti aspek sosial, kondisi geografis, politik, administrasi, kelembagaan, lingkungan, serta infrastruktur umum. Pendekatan tradisional yang hanya menilai ketimpangan berdasarkan dimensi ekonomi dianggap kurang memadai untuk menjelaskan kompleksitas fenomena ini.

Kutscherauer et al. (2010) menyarankan bahwa ketimpangan wilayah dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu vertikal dan horizontal. Perspektif vertikal melihat ketimpangan berdasarkan tingkat administrasi, misalnya pada tingkat internasional (seperti Eropa), nasional, dan lokal. Sebaliknya, perspektif horizontal menilai ketimpangan berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti dimensi sosial, ekonomi, dan fisik.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif adalah metode analisis yang bertujuan membandingkan dua atau lebih objek, fenomena, atau situasi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta pola yang muncul. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan untuk menganalisis ketimpangan yang terjadi di seluruh provinsi di Pulau Sulawesi.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari situs website resmi lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta melalui kajian pustaka. Informasi yang ada pada situs website mencakup seluruh provinsi di Indonesia, dengan fokus khusus pada wilayah Pulau Sulawesi.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan kuantitatif merupakan metode yang mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk angka untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Data sekunder yang digunakan tidak diperoleh langsung dari objek penelitian, melainkan melalui berbagai sumber resmi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis skalogram, yang berfungsi untuk menentukan pusat dan hierarki wilayah dengan cara mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pelayanan di berbagai provinsi di Pulau Sulawesi. Metode ini memberikan peringkat hierarki yang lebih tinggi kepada pusat pertumbuhan yang memiliki jumlah dan jenis sarana-prasarana lebih banyak. Skalogram juga digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditentukan.

HASIL & PEMBAHASAN

Untuk menganalisis calon wilayah pusat dengan pertumbuhan baru yang berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan maka teknik yang digunakan ialah analisis skalogram. Teknik analisis ini mengidentifikasi Provinsi, Kabupaten / Kota yang dapat dikelompokkan menjadi calon pusat pertumbuhan yang dapat didasarkan pada fasilitas pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, pemerintahan dan fasilitas yang dimiliki oleh wilayah tersebut lainnya. Langkah selanjutnya pada analisis skalogram ini ialah perhitungan untuk menentukan indeks sentralitas terbobot.

Berdasarkan perhitungan skalogram, jumlah error yang diperoleh dari 6 Provinsi (N) dan 11 fasilitas (F) di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi adalah 11. Dari 11 jenis fasilitas yang didata, jumlah jenis fasilitas tertinggi yang ada dalam satu Provinsi adalah 11 jenis fasilitas pada Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, sementara yang terendah ialah 6 jenis fasilitas pada Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk menguji kelayakan skalogram, digunakan perhitungan *Coeffisien of Reproducibility*

$$\begin{aligned} COR &= 1 - \frac{\sum e}{N \times K} \\ COR &= 1 - \frac{11}{6 \times 11} \\ COR &= 1 - \frac{11}{66} \\ COR &= 1 - 0,16 \\ COR &= 0,84 \end{aligned}$$

Sesuai ketentuan, nilai *Coeffisien of Reproducibility* (COR) yang layak untuk dianalisis adalah $\geq 0,9$. Dengan nilai COR pada hasil uji di Pulau Sulawesi dapat dideskripsikan bahwasannya masih kurangnya efisiensi pemerataan distribusi fasilitas di pulau Sulawesi. Meskipun angka COR mendekati 0.85 atau dibulatkan menjadi 0.9, namun masih terdapat ketimpangan distribusi diatas batas wajar pada pembangunan fasilitas di pulau Sulawesi, sehingga persentasi efisiesnsi distribusi pembangunan fasilitas di pulau Sulawesi hanya 0,84 atau 84% dan sisanya atau sekitar 16% masih terjadi ketimpangan pada distribusi pembangunan fasilitas di pulau tersebut.

Dengan memperhitungkan selisih antara jumlah jenis fasilitas tertinggi yang ada dalam satu Kabupaten/Kota dan jumlah jenis fasilitas terendah kemudian dibagi dengan banyaknya Kabupaten/Kota, maka Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Pulau Sulawesi dibagi menjadi 3 klasifikasi.

$$\text{Range} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Orde}}$$

$$\text{Range} = \frac{11 - 6}{3}$$

$$\text{Range} = \frac{5}{3}$$

$$\text{Range} = 1,66 \text{ atau } 2$$

Maka dapat ditarik pembahasan bahwa jarak antar orde ialah 2 kemudian dilanjutkan dengan mengelompokkan range dan orde sebagai berikut:

Tabel Hasil Range Orde Skalogram

Orde	Range
Orde I	> 10,1 – 12
Orde II	> 8,01 – 10
Orde III	> 6,01 – 8

Sumber: Olahan Sendiri

Hasil analisis skalogram yang sudah memperoleh hasil dapat dideskripsikan lebih lanjut dengan menentukan Orde atau jarak skalogram antara Kabupaten/Kota dan juga Provinsi yang terdapat di Pulau Sulawesi. Kelompok Orde I merupakan kelompok dengan tingkat kepemilikan fasilitas tertinggi dengan nilai 10,01-12 dengan jarak orde 2, dan Provinsi yang berada di Orde I atau kepemilikan terbanyak yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi utara dengan kepemilikan fasilitas sebanyak 11 fasilitas. Provinsi selanjutnya yang termasuk dalam Orde II atau kepemilikan sedang ialah Provinsi Sulawesi tenggara dan Provinsi Gorontalo dengan kepemilikan masing-masing fasilitas sebanyak 10. Kemudian Provinsi dengan kepemilikan fasilitas terendah dengan kelompok Orde III yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat dengan masing-masing kepemilikan fasilitas sebanyak 6 untuk Sulawesi Selatan dan 7 untuk Sulawesi Barat.

Tabel Hasil Tingkatan Orde I-III

NO	Kabupaten	Jumlah Penduduk	Jumlah Jenis Fasilitas	Orde
1	Sulawesi Tengah	31218	11	Orde I
2	Sulawesi Selatan	94634	6	Orde III
3	Sulawesi Tenggara	27931	10	Orde II
4	Sulawesi Utara	27018	11	Orde I
5	Sulawesi Barat	15032	7	Orde III
6	Gorontalo	12278	10	Orde II

Sumber: Hasil Olahan Sendiri

Berdasarkan hasil analisis skalogram diatas dapat dilihat bahwa terdapat Provinsi yang memiliki jumlah penduduk besar dan banyak akan tetapi memiliki tingkat keberagaman dan kepemilikan fasilitas yang justru rendah. Hal inilah yang dapat mendeskripsikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah atau Provinsi tidak cukup apabila dilihat dari segi keberagaman fasilitasnya saja, namun ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan khususnya frekuensi penyebaran pada setiap jenis fasilitas tersebut. Karena pada tingkat frekuensi fasilitas pada suatu Provinsi dapat mempengaruhi indeks sentralitas Provinsi tersebut, semakin besar frekuensinya maka semakin tinggi pula nilai sentralitasnya. Sehingga daerah dengan penduduk yang banyak belum tentu memiliki fasilitas yang memadai sehingga hal inilah yang perlu diperhatikan secara intens oleh pemerintah untuk meningkatkan jangkauan dan frekuensi pada pembangunan fasilitas di berbagai daerah khususnya di Pulau Sulawesi.

Tabel Hasil Indeks Skalogram

NO	Provinsi	Jumlah Jenis Fasilitas	Nilai IPD	Hierarki
1	Sulawesi Tengah	11	24,5190414	Hierarki 1
2	Sulawesi Selatan	6	5,63297774	Hierarki 3
3	Sulawesi Tenggara	10	16,4624923	Hierarki 1
4	Sulawesi Utara	11	18,9106718	Hierarki 1
5	Sulawesi Barat	7	11,9566421	Hierarki 3
6	Gorontalo	10	19,9247932	Hierarki 1
Rata-Rata		16,2344364		
Standar Devisiasi		6,63563272		

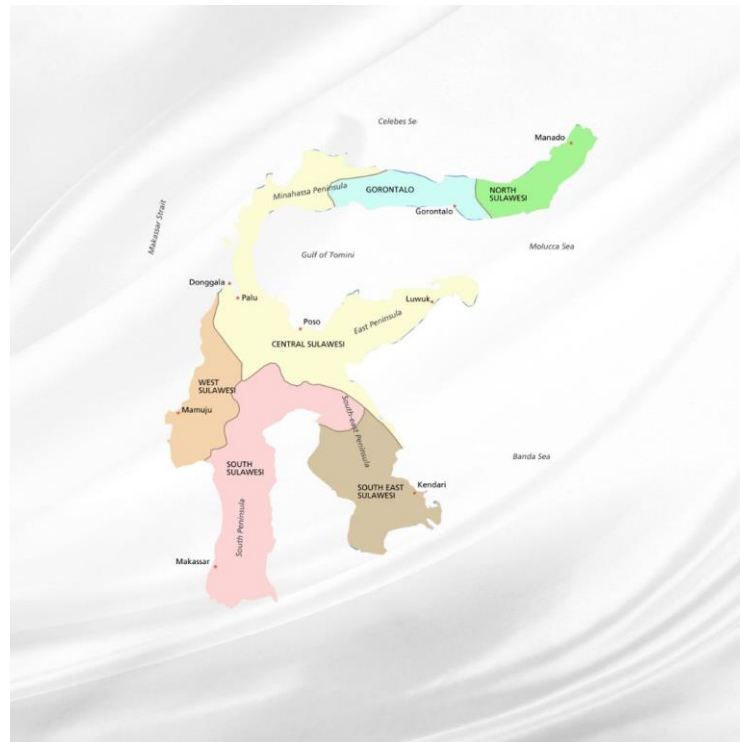
Sumber: Hasil Olahan Sendiri

Berdasarkan hasil analisis diatas tentang hasil indeks skalogram pada Provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi. Adapun Provinsi yang termasuk dalam Hierarki 1 ialah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo. Ini mengartikan bahawasannya provinsi tersebut merupakan wilayah yang menarik bagi penduduk untuk melakukan aktivitas di wilayah tersebut karena lengkapnya kepemilikan dari berbagai fasilitas yang terdapat di wilayah tersebut yang mempermudah pergerakan ekonomi, sosial dan pemerintahan. Sedangkan wilayah yang termasuk dalam hierarki 3 ialah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat dengan rendahnya fasilitas yang dimiliki bahkan jauh lebih sedikit dibandingkan provinsi lainnya hal ini tentu memerlukan perhatian khusus bagi pemerintahan untuk mengembangkan dan membangun fasilitas yang memadai di provinsi yang belum tersebar frekuensi pembangunan, agar pembangunan dan kepemilikan fasilitas dapat merata pada setiap Provinsi di Pulau Sulawesi.

Pusat pertumbuhan ialah tempat atau lokasi yang terdapat pada suatu wilayah yang biasanya identik memiliki fasilitas dan penyebaran kepemilikan jasa layanan yang lebih lengkap, dimana ketersediaan inilah yang meningkatkan daya tarik suatu daerah untuk menjadi wilayah sentral bagi perdagangan dan jasa. Lokasi inilah yang tentunya akan mampu memanfaatkan sumber daya yang baik dan akan memiliki pengaruh terhadap wilayah-wilayah disekitarnya sebagai alternatif untuk mengerakkan pembangunan dan memacu perkembangan fasilitas dan daya tarik masyarakat untuk berkegiatan dan memperoleh pendapatan untuk masyarakat itu sendiri.

Pulau Sulawesi

Pulau Sulawesi, yang terletak di tengah kepulauan Indonesia, adalah salah satu pulau terbesar di Nusantara dengan luas sekitar 174.600 km². Bentuknya yang unik menyerupai huruf "K" menjadikan Sulawesi memiliki garis pantai yang panjang, berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Banda, dan Selat Makassar. Pulau ini terbagi menjadi enam provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Posisi geografisnya di antara koordinat 0°-6° Lintang Selatan dan 118°-125° Bujur Timur memberikan Sulawesi peran strategis sebagai penghubung perdagangan, budaya, dan geopolitik antara Indonesia bagian barat dan timur.



Sumber: Wikipedia Diolah

Secara ekonomi, Pulau Sulawesi adalah salah satu wilayah penggerak perekonomian nasional, dengan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Sulawesi adalah penghasil utama kakao, kopi, dan jagung, sementara kawasan industri di Morowali menjadi pusat pengolahan nikel terbesar di Indonesia. Selain itu, perikanan di Teluk Tomini dan Laut Sulawesi memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor hasil laut. Infrastruktur ekonomi juga terus berkembang, termasuk bandara internasional, pelabuhan, dan jalan penghubung antarprovinsi yang mempercepat distribusi barang dan jasa. Peran strategis ini menjadikan Sulawesi tidak hanya sebagai pusat perekonomian kawasan timur Indonesia, tetapi juga sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan nasional.

1. Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah adalah provinsi terbesar di Pulau Sulawesi, baik dari segi luas wilayah maupun keanekaragaman sumber daya alam dan budaya. Secara geografis, provinsi ini berada pada koordinat 2°22'-3°48' Lintang Selatan dan 119°22'-124°22' Bujur Timur, dengan posisi strategis yang menjadikannya penghubung antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur.

Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah adalah Palu, sebuah kota yang terletak di pesisir barat Teluk Palu. Palu berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kota ini dikenal memiliki keindahan alam yang memadukan laut, perbukitan, dan lembah.



Sumber: Wikipedia

Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah sekitar 61.841 km², menjadikannya provinsi dengan area terluas di Pulau Sulawesi. Secara administratif, wilayah ini terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota. Sulawesi Tengah berbatasan dengan Sulawesi Barat di barat, Gorontalo di utara, Sulawesi Selatan di selatan, serta Laut Maluku dan Maluku Utara di timur.

Sulawesi Tengah memiliki sektor ekonomi yang didominasi oleh pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Komoditas unggulan meliputi kelapa, kakao, kopi, serta hasil tambang seperti nikel dan emas. Salah satu kawasan pertambangan terbesar di provinsi ini adalah Morowali, yang juga dikenal sebagai pusat industri berbasis nikel di Indonesia.

2. Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi dan dikenal sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan budaya di kawasan timur Indonesia. Secara geografis, provinsi ini berada pada koordinat 0°12'-8° Lintang Selatan dan 116°48'-122°36' Bujur Timur, menjadikannya wilayah strategis yang menghubungkan Pulau Sulawesi dengan wilayah lainnya di Nusantara.

Ibu kota Sulawesi Selatan adalah Makassar, kota terbesar di Pulau Sulawesi sekaligus pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan di kawasan timur Indonesia. Makassar memiliki pelabuhan laut yang vital, yakni Pelabuhan Soekarno-Hatta, yang mendukung aktivitas perdagangan domestik maupun internasional.



Sumber: Wikipedia diolah

Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah sekitar 46.717 km² dan terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone di timur, Selat Makassar di barat, dan Laut Flores di selatan. Beberapa kabupaten besar, seperti Bone, Gowa, dan Wajo, memiliki peran penting dalam sektor ekonomi dan budaya.

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dengan perekonomian paling berkembang di Indonesia bagian timur. Sektor pertanian menjadi andalan, dengan hasil utama berupa padi, jagung, kakao, dan kopi. Selain itu, sektor perikanan dan peternakan juga menyumbang kontribusi signifikan bagi perekonomian provinsi ini. Sektor pertambangan juga berkembang, terutama pengelolaan sumber daya seperti nikel dan emas. Di sisi lain, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan dan jasa, dengan Makassar sebagai pusat distribusi logistik dan ekspor-impor di kawasan timur Indonesia.

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi, Indonesia. Wilayah ini berada pada koordinat 3°-6° Lintang Selatan dan 120°45'-124°30' Bujur Timur, menjadikannya daerah yang strategis karena berada di jalur pelayaran penting antara Indonesia bagian tengah dan timur.

3. Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi, Indonesia. Wilayah ini berada pada koordinat 3°-6° Lintang Selatan dan 120°45'-124°30' Bujur Timur, menjadikannya daerah yang strategis karena berada di jalur pelayaran penting antara Indonesia bagian tengah dan timur.

Ibu kota Sulawesi Tenggara adalah Kendari, sebuah kota pesisir yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Kota ini terletak di tepi Teluk Kendari, menjadikannya salah satu wilayah dengan panorama alam laut yang memukau. Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota, dengan luas wilayah sekitar 38.140 km². Provinsi ini berbatasan dengan Laut Banda di sebelah selatan, Sulawesi Tengah di barat laut, Sulawesi

Selatan di barat daya, dan Maluku di timur. Pulau-pulau seperti Wakatobi, Muna, dan Buton menjadi bagian penting dari provinsi ini, baik secara geografis maupun ekonomi.



Sumber: Wikipedia diolah

Ekonomi Sulawesi Tenggara didukung oleh sektor pertambangan, pertanian, dan perikanan. Provinsi ini dikenal sebagai penghasil nikel terbesar di Indonesia, yang diekspor ke berbagai negara. Selain itu, Sulawesi Tenggara juga terkenal dengan hasil perkebunan seperti kakao, kelapa, dan jambu mete.

Di sektor pariwisata, Sulawesi Tenggara memiliki destinasi kelas dunia seperti Taman Nasional Wakatobi, yang menjadi surga bagi pecinta menyelam dan wisata bahari. Selain itu, budaya lokal seperti kerajinan kain tenun khas Buton dan tradisi masyarakat Bajo menjadi daya tarik tersendiri.

4. Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dan berada pada koordinat antara 0°30' - 4°03' Lintang Utara serta 121°127' - 127°32' Bujur Timur. Posisi strategisnya menjadikan Sulawesi Utara sebagai gerbang Indonesia ke kawasan Asia Pasifik, berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Filipina.

Ibu kota provinsi Sulawesi Utara adalah Manado, yang juga menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut. Manado dikenal dengan keramahan penduduknya serta potensi pariwisata yang luar biasa, seperti Taman Laut Bunaken, yang merupakan salah satu lokasi menyelam terbaik di dunia.



Sumber: Wikipedia diolah

Secara administratif, Sulawesi Utara terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota, dengan total luas wilayah sekitar 13.852 km². Wilayah ini dikelilingi oleh Laut Sulawesi di utara, Provinsi Gorontalo di barat, dan Laut Maluku di timur. Sulawesi Utara juga memiliki pulau-pulau kecil strategis seperti Kepulauan Sangihe dan Talaud, yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik.

Perekonomian Sulawesi Utara didukung oleh sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Komoditas utama di sektor pertanian mencakup kelapa, cengkeh, dan pala, yang sebagian besar diekspor ke luar negeri. Perikanan menjadi tulang punggung masyarakat pesisir, sementara pariwisata semakin berkembang berkat destinasi seperti Bunaken, Bukit Kasih, Danau Tondano, dan Pulau Lembeh.

5. Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi. Wilayah ini berada di koordinat 2°45'-3°30' Lintang Selatan dan 118°-120° Bujur Timur, menjadikannya provinsi dengan posisi strategis yang menghubungkan bagian utara dan selatan Sulawesi.

Ibu kota Sulawesi Barat adalah Mamuju, sebuah kota pesisir yang berada di tepi Selat Makassar. Mamuju berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Kota ini terus berkembang, terutama dengan adanya berbagai proyek infrastruktur untuk mendukung kemajuan wilayah.



Sumber: Wikipedia diolah

Provinsi Sulawesi Barat secara administratif terdiri dari 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, dan Pasangkayu. Dengan luas wilayah sekitar 16.937 km², Sulawesi Barat berbatasan dengan Sulawesi Tengah di utara, Sulawesi Selatan di selatan, serta Selat Makassar di bagian barat. Perekonomian Sulawesi Barat didukung oleh sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian. Komoditas unggulan di provinsi ini meliputi kakao, kelapa sawit, dan kopi. Kakao Sulawesi Barat, khususnya, dikenal memiliki kualitas tinggi dan menjadi salah satu produk ekspor andalan.

Selain itu, Sulawesi Barat memiliki potensi wisata alam yang luar biasa. Destinasi seperti Pantai Dato di Majene, perbukitan hijau di Mamasa, hingga keindahan bawah laut di sekitar wilayah pesisir menjadikannya tempat menarik untuk dikunjungi. Pariwisata budaya juga menjadi daya tarik, terutama festival seni dan tradisi lokal suku Mandar.

6. Gorontalo

Provinsi Gorontalo terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, tepatnya di Semenanjung Gorontalo. Secara geografis, provinsi ini berada pada koordinat 0°30'-1°30' Lintang Utara dan 121°-123° Bujur Timur, menjadikannya wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini di selatan dan Laut Sulawesi di utara.

Ibu kota Gorontalo adalah Kota Gorontalo, yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya di provinsi ini. Kota ini dikenal dengan sebutan "Serambi Madinah" karena identitas masyarakatnya yang religius dan mayoritas beragama Islam.



Sumber: Wikipedia diolah

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi muda di Indonesia, dimekarkan dari Sulawesi Utara pada tahun 2000. Dengan luas wilayah sekitar 12.435 km², Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah di barat, Sulawesi Utara di timur, Teluk Tomini di selatan, dan Laut Sulawesi di utara.

Perekonomian Gorontalo didukung oleh sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Provinsi ini dikenal sebagai penghasil utama jagung di Indonesia, sehingga sering dijuluki sebagai "Lambung Jagung Nasional." Selain itu, hasil perikanan dari Teluk Tomini dan Laut Sulawesi, seperti ikan tuna dan cakalang, menjadi komoditas penting yang diekspor. Gorontalo juga memiliki potensi sumber daya mineral, seperti emas dan pasir kuarsa, yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Di sisi lain, sektor pariwisata mulai berkembang, memanfaatkan keindahan alam dan kekayaan budaya lokal.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan analisis skalogram berbobot untuk menentukan hierarki wilayah di Pulau Sulawesi berdasarkan ketersediaan fasilitas publik. Hasil menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo berada pada Hierarki I karena memiliki fasilitas yang lebih lengkap, sedangkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berada pada Hierarki III karena kurangnya fasilitas. Nilai Coefficient of Reproducibility (COR) sebesar 0,84 menunjukkan adanya ketimpangan distribusi fasilitas di Pulau Sulawesi, dengan 16% wilayah masih mengalami ketidakseimbangan. Analisis juga mengidentifikasi bahwa tingkat populasi tidak selalu berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas, yang menunjukkan perlunya pemerataan pembangunan.

Saran

1. Peningkatan Infrastruktur di Wilayah Tertinggal, Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan fasilitas publik, terutama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Langkah ini penting untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan aksesibilitas layanan dasar.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Lokal, wilayah dengan fasilitas terbatas dapat diberdayakan melalui pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, atau pariwisata, disesuaikan dengan potensi lokal.

3. Perencanaan Pembangunan Berbasis Data, analisis data yang lebih mendalam dan real-time perlu diterapkan untuk memahami kebutuhan spesifik setiap wilayah, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih tepat sasaran.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala, peninjauan ulang distribusi fasilitas dan pencapaian target pembangunan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Roland Gunena, S. T. (2016). HIRARKI WILAYAH KOTA MANADO. *SPASIAL*, 116-125.
- BPS. (2019, Oktober 16). *Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu, dan Polindes Menurut Provinsi, 2018*. Retrieved November 11, 2024, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YmlzemNGUkNVblZLVVhObIREWnZXbkEzWld0eVVUMDkjMw==/jumlah-rumah-sakit-umum--rumah-sakit-khusus--puskesmas--klinik-pratama--dan-posyandu-menurut-provinsi--2020.html?year=2018>
- BPS. (2022, Februari 23). *Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Provinsi, 2020*. Retrieved November 11, 2024, from Badan Pusat Statistik : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YmlzemNGUkNVblZLVVhObIREWnZXbkEzWld0eVVUMDkjMw==/jumlah-rumah-sakit-umum--rumah-sakit-khusus--puskesmas--klinik-pratama--dan-posyandu-menurut-provinsi--2020.html?year=2020>
- BPS. (2022, Februari 16). *Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2021/2022*. Retrieved November 11, 2024, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/TVRWUIFYUnpVRE5ZZHpSSIZHRm5WbVpXUkRFMFVUMDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-taman-kanak-kanak--tk--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-menurut-provinsi--2021.html?year=>
- BPS. (2022, Oktober 3). *Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan (Persen), 2015-2021*. Retrieved November 11, 2024, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzgxIzI=/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber--penerangan.html>
- BPS. (2023, Februari 17). *Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2022/2023*. Retrieved November 11, 2024, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VWtKTmFFbDZaSFJWWVhOYU16WmhaRzlCYIM5Wlp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-dasar--sd--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-provinsi--2022.html?year=2022>

- BPS. (2023, Februari 17). *Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2022/2023*. Retrieved November 11, 2024, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTFsRmNubEhOWE5ZTUZsdWVHOHhMMFpPWm5VMFp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-atas--sma--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-provinsi--2022.html?year=2022>
- BPS. (2023, Januari 31). *Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2022/2023*. Retrieved November 11, 2024, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/TVU5MFYwMVlaMFJ4ZW5obWJGZHNVMjFpVUhoMlp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-kejuruan--smk--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-provinsi--2022.html?year=2022>
- BPS. (2023, Februari 17). *Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2022/2023*. Retrieved November 11, 2024, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZHpkb1ZtcDNZV2RHTIUweVdFZ3JhVk13Ym1ScVp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-pertama--smp--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-provinsi--2022.html?year=2022>
- BPS. (2023, Desember 12). *Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023*. Retrieved November 11, 2024, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0MSMy/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi--persen-.html>
- BPS. (2024, November 15). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2022-2024*. Retrieved November 23, 2024, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI=-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2024, Juli 17). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah, 2024*. Retrieved 2024 November, 2024, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-rasio--maret-2023.html>
- BPS. (2024, Januari 11). *Jumlah Air Bersih yang Disalurkan Perusahaan Air Bersih (ribu m³), 2020-2022*. Retrieved November 11, 2024, from Badan Pusat Statistik : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE1IzI=/jumlah-air-bersih-yang-disalurkan-perusahaan-air-bersih.html>
- BPS. (2024, Februari 20). *Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km), 2022*. Retrieved November 11, 2024, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/U0VOeFZEZFNiVnByUkdGMINrOTFVVGRHY1ZkVGR6MDkjMw==/panjang-jalan-menurut-provinsi-dan-tingkat-kewenangan-pemerintahan--km--2022.html>

- jang-jalan-menurut-provinsi-dan-tingkat-kewenangan-pemerintahan--km---2022.html?year=2022
- Dea Cahya Edinita, D. P. (2020). Analisis Pusat Pelayanan Kegiatan Minapolitan. *SPECTA Journal of Technology*, 1-13.
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *AI-INTAJ: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Kemendes. (2024). *SEBARAN PUSKESMAS BERDASARKAN PROVINSI*. Retrieved November 11, 2024, from Kemendes: <https://www.kemendes.go.id/id/dashboard-puskesmas>
- Mukhlis, M. (2023, Februari 27). *ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH*. Retrieved November 23, 2024, from BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan: <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah#:~:text=Kebijakan%20pemerintah%20daerah%20adalah%20kebijakan,bertujuan%20untuk%20meningkatkan%20kesejahteraan%20masyarakat>.
- Muktiali, P. A. (2015). KAJIAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Teknik PWK*, 484-498.
- Negeri, D. P. (2024). *DATA POTENSI SARPRAS KESEHATAN - 2024*. Retrieved November 11, 2024, from Kementerian Dalam Negeri: <https://e-prodeskel.kemendagri.go.id/v/2024/data-integrasi/23/data-potensi-sarpras-kesehatan>
- Taufiqurrachman, F. (2024). Kajian Indeks Skalogram, Indeks Sentralitas Marshall dan Indeks Gravitasi Pada Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5952-5963.
- Utara, B. P. (2024, September 20). *Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribuan Jiwa), 2024*. Retrieved November 11, 2024, from Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara: <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTU4IzI=/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-diindonesia.html>.